JURNAL ILMU EKONOMI (JIE)
Vol. 4 No. 1, April 2025
https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie
E-ISSN : 2985-4652

ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SEBAGAI UPAYA MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI LAMPUNG

Miftakhul Jannah[1], Erlin Kurniati[2]

[1,2] UIN Raden Intan Lampung, Provinsi lampung

ABSTRACT

Infrastructure development has a strategic role in driving the economic growth of a region. Local governments have the responsibility to plan, manage, and implement infrastructure policies to improve connectivity, investment, and community welfare. This study aims to analyze the role of Lampung Province's local government in infrastructure development and its impact on economic growth. The research method used includes a qualitative approach with secondary data analysis from various related sources. The results show that infrastructure development policy in Lampung focuses on improving transportation networks, public facilities, and inter-regional connectivity. However, there are several challenges such as budget constraints, inter-agency coordination, and regulatory barriers. Therefore, more effective strategies are needed in infrastructure management, including collaboration with the private sector and optimization of regional budgets. With an optimized role of local government, infrastructure development can be a driver of sustainable economic growth in Lampung Province.

Keywords: Infrastructure development, local government, economic growth, Lampung Province

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam perencanaan, pengelolaan, dan implementasi kebijakan infrastruktur guna meningkatkan konektivitas, investasi, dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam pembangunan infrastruktur serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan mencakup pendekatan kualitatif dengan analisis data sekunder dari berbagai sumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan infrastruktur di Lampung berfokus pada peningkatan jaringan transportasi, fasilitas publik, dan konektivitas antarwilayah, akan tetapi terdapat beberapa tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarlembaga, dan hambatan regulasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan infrastruktur, termasuk kolaborasi dengan sektor swasta dan optimalisasi anggaran daerah. Dengan peran pemerintah daerah yang optimal, pembangunan infrastruktur dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Kata Kunci: Pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi, Provinsi Lampung

RIWAYAT ARTIKEL
Tersedia *Online*: 04-04-2025

KORESPONDENSI:
Nama : Miftakhul Jannah
E-mail: jannamifta606@gmail.com

DOI:
https://doi.org/10.59827/jie.v4i1.220
PENERBIT:
Laboratorium Riset Ekonomi

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas infrastruktur. Infrastruktur yang memadai dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, menciptakan lapangan kerja, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar (Susanto, 2021). Dalam konteks ini, infrastruktur mencakup berbagai aspek, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, serta fasilitas publik lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Di Provinsi Lampung, peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur menjadi sangat strategis mengingat letak geografis Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera (Fauzan, 2022). Dengan posisi yang strategis, Lampung memiliki potensi besar untuk menjadi pusat perdagangan dan distribusi, baik untuk barang-barang yang berasal dari Pulau Sumatera maupun dari luar pulau. Oleh karena itu, investasi dalam infrastruktur transportasi, seperti jalan raya dan pelabuhan, sangat penting untuk meningkatkan konektivitas antar daerah dan mempermudah akses ke pasar.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, akses yang lebih baik ke layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas umum lainnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik juga dapat menarik investasi dari luar daerah, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Namun, tantangan dalam pembangunan infrastruktur di Lampung tidak bisa diabaikan. Beberapa kendala yang sering dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, masalah lahan, serta koordinasi antar lembaga pemerintah yang seringkali kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan kualitas infrastruktur, pemerintah daerah juga perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan tidak hanya akan menjaga kelestarian alam, tetapi juga dapat meningkatkan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi.

TELAAH LITERATUR

Peran Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan urusan pembangunan, termasuk infrastruktur (UU No. 23 Tahun 2014). Dalam kerangka ini, pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengalokasian anggaran, penyusunan perencanaan pembangunan, serta evaluasi proyek-proyek strategis. Kewenangan ini memberikan pemerintah daerah fleksibilitas untuk merespons kebutuhan dan prioritas masyarakat setempat, serta untuk mengembangkan infrastruktur yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.

Pengalokasian anggaran menjadi salah satu aspek krusial dalam pengelolaan infrastruktur. Pemerintah daerah harus mampu merencanakan dan mengelola anggaran dengan efisien agar proyek-proyek infrastruktur dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, penyusunan perencanaan pembangunan yang baik akan memastikan bahwa proyek-proyek yang diusulkan tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.

Evaluasi proyek-proyek strategis juga merupakan bagian penting dari tanggung jawab pemerintah daerah. Melalui evaluasi, pemerintah dapat menilai efektivitas dan dampak dari proyek infrastruktur yang telah dilaksanakan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa investasi yang dilakukan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan ekonomi daerah. Selain itu, evaluasi yang baik dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan proyek-proyek di masa mendatang.

Dalam konteks Provinsi Lampung, di mana infrastruktur sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan konektivitas, peran aktif pemerintah daerah dalam pengelolaan urusan pembangunan infrastruktur menjadi semakin vital. Dengan memanfaatkan kewenangan yang ada, pemerintah daerah dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga mempersiapkan daerah untuk tantangan dan peluang di masa depan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan Infrastruktur

Infrastruktur memiliki hubungan langsung dengan produktivitas dan efisiensi ekonomi. Menurut Barro (1998), pembangunan infrastruktur secara signifikan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menarik investasi baru. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa infrastruktur yang baik memfasilitasi pergerakan barang dan jasa, mengurangi biaya transportasi, dan mempercepat waktu pengiriman. Ketika infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, dan sistem energi, berfungsi dengan baik, perusahaan dapat beroperasi lebih efisien, yang pada gilirannya meningkatkan output dan produktivitas.

Investasi pemerintah pada infrastruktur juga dianggap sebagai pendorong utama pertumbuhan wilayah (Susanto, 2021). Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan raya yang menghubungkan daerah terpencil dengan pusat-pusat ekonomi, atau pelabuhan yang meningkatkan akses ke pasar internasional, hal ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja selama fase konstruksi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat setempat. Infrastruktur yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses sumber daya, pasar, dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing mereka.

Lebih jauh lagi, infrastruktur yang baik juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Akses yang lebih baik ke layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, dapat meningkatkan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga pada aspek sosial, yang pada akhirnya menciptakan siklus positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, penting untuk dicatat bahwa pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan mempertimbangkan dampak lingkungan. Infrastruktur yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan masalah jangka panjang, seperti kerusakan lingkungan dan ketidakadilan sosial.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama dalam menilai kemajuan suatu daerah. Pertumbuhan ini mencerminkan peningkatan output atau nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu (Todaro & Smith, 2020). Dalam konteks daerah, pertumbuhan ekonomi dapat dipengaruhi oleh

berbagai faktor, termasuk investasi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia (SDM), kebijakan fiskal daerah, dan akses pasar.

Investasi infrastruktur, khususnya, berperan penting dalam menciptakan fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas publik lainnya, dapat meningkatkan efisiensi distribusi barang dan jasa, mengurangi biaya transportasi, dan mempercepat waktu pengiriman. Hal ini memungkinkan pelaku usaha untuk beroperasi lebih efektif dan meningkatkan daya saing mereka di pasar. Selain itu, infrastruktur yang memadai juga dapat menarik investasi baru, yang pada gilirannya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pemerintah daerah memegang peranan kunci dalam menciptakan iklim ekonomi yang kondusif melalui pembangunan fisik dan kebijakan strategis. Dengan merumuskan kebijakan yang mendukung investasi dan pengembangan infrastruktur, pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi yang vital. Menurut BPS Provinsi Lampung (2023), pertumbuhan ekonomi Lampung menunjukkan tren positif setelah pandemi, terutama pada sektor-sektor yang mendapatkan dukungan infrastruktur seperti transportasi, konstruksi, dan pertanian. Sektor-sektor ini tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Dengan demikian, hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi menjadi sangat erat, terutama dalam konteks daerah berkembang seperti Provinsi Lampung. Pembangunan infrastruktur yang terencana dan berkelanjutan dapat menjadi pendorong utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus berinvestasi dalam infrastruktur dan mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah secara keseluruhan. Dalam menghadapi tantangan global dan lokal, pemerintah daerah juga perlu beradaptasi dan berinovasi dalam pendekatan pembangunan infrastruktur, termasuk mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai tidak hanya bersifat sementara, tetapi dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konteks dan dinamika yang terjadi di lapangan.

Data dikumpulkan melalui beberapa metode, termasuk studi literatur, dokumentasi, mendalam dengan beberapa informan kunci. Informan yang terlibat dalam penelitian ini meliputi pegawai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), serta pelaku usaha di Provinsi Lampung. Melalui ini, peneliti dapat memperoleh perspektif yang beragam mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Studi literatur dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang relevan, termasuk buku, artikel, dan laporan penelitian sebelumnya. Dokumentasi juga digunakan untuk mengakses data dan informasi yang telah tersedia, seperti laporan tahunan dari pemerintah daerah dan statistik ekonomi. Dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih holistik dan mendalam mengenai hubungan antara pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung (Sugiyono, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Lampung memiliki posisi geografis yang strategis sebagai penghubung antara Pulau Jawa dan Sumatera. Letak ini memberikan keuntungan kompetitif bagi provinsi tersebut dalam hal perdagangan dan distribusi barang. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur di provinsi ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama dengan beroperasinya Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Bakauheni–Terbanggi Besar. Infrastruktur ini berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi logistik dan mobilitas masyarakat, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi daerah (Fauzan, 2022).

Jalan tol ini tidak hanya mempercepat waktu perjalanan antara daerah-daerah di Lampung dan Jawa, tetapi juga mengurangi biaya transportasi, yang sangat penting bagi pelaku usaha. Dengan adanya akses yang lebih baik, para pengusaha dapat mengoptimalkan rantai pasokan mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas pasar mereka. Hal ini sangat relevan bagi sektor-sektor yang bergantung pada distribusi barang, seperti pertanian, perdagangan, dan industri.

Selain jalan tol, pembangunan pelabuhan seperti Pelabuhan Panjang dan Pelabuhan Bakauheni juga terus dikembangkan untuk mendukung arus barang dan penumpang. Pelabuhan Bakauheni, sebagai salah satu pelabuhan utama, berfungsi sebagai pintu gerbang bagi transportasi laut antara Sumatera dan Jawa. Peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi logistik dan memperlancar arus barang, yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional.

Lebih lanjut, peningkatan akses listrik dan jaringan internet juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital dan industri rumahan (Susanto, 2021). Dengan adanya akses listrik yang lebih baik, industri kecil dan menengah (IKM) dapat beroperasi dengan lebih efisien, sementara jaringan internet yang memadai memungkinkan pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital dalam pemasaran dan penjualan produk mereka. Hal ini sangat penting dalam era digital saat ini, di mana banyak usaha kecil beralih ke platform online untuk menjangkau konsumen yang lebih luas.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur

Pemerintah Provinsi Lampung berperan dalam berbagai aspek strategis pembangunan infrastruktur yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, melalui kebijakan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah daerah mengalokasikan dana yang signifikan untuk pembangunan jalan, irigasi, dan fasilitas umum lainnya. Penganggaran yang tepat dan terencana ini memungkinkan pemerintah untuk fokus pada proyek-proyek yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat dan efisiensi ekonomi.

Kedua, pemerintah Provinsi Lampung juga menjalin sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah pusat untuk pelaksanaan proyek nasional,

seperti pembangunan jalan tol dan bandara. Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek-proyek besar dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sinergi ini juga membantu dalam pengalokasian sumber daya yang lebih efisien dan meminimalkan tumpang tindih dalam pelaksanaan proyek (Nurhayati, 2023).

Selain itu, pemerintah daerah aktif mendorong kerja sama dengan sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Melalui skema ini, pemerintah dapat melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur, seperti perumahan rakyat, kawasan industri, dan sarana pendidikan. Kerja sama ini tidak hanya membantu mengatasi keterbatasan dana APBD, tetapi juga mempercepat proses pembangunan. Dengan melibatkan sektor swasta, pemerintah dapat memanfaatkan keahlian dan inovasi yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dalam merancang dan melaksanakan proyek infrastruktur.

Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung dapat berjalan lebih cepat dan efisien, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, peran aktif pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Provinsi Lampung saat ini menghadapi berbagai persoalan serius terkait pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Keluhan masyarakat terkait kondisi jalan yang rusak semakin meningkat, terutama di daerah-daerah seperti Lampung Selatan, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Jalan yang berlubang dan tidak terawat menjadi penghambat utama aksesibilitas dan mobilitas masyarakat, serta menimbulkan risiko kecelakaan lalu lintas yang tinggi. Kondisi ini pada akhirnya berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat setempat dan menghambat upaya peningkatan kesejahteraan.

Desakan publik agar pemerintah daerah lebih fokus pada peningkatan infrastruktur dasar semakin kuat. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) diharapkan dapat mengambil peran strategis dalam mendorong pemerintah daerah untuk

mengalokasikan anggaran yang lebih besar guna pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, memegang peran krusial dalam penyediaan infrastruktur publik. Meskipun pelibatan pihak swasta melalui kerja sama atau kemitraan dapat menjadi alternatif, tidak semua proyek infrastruktur dapat dijalankan oleh sektor swasta karena tingginya kebutuhan modal, jangka waktu pengembalian yang panjang, serta tingginya risiko investasi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah menjadi sangat penting untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan menarik minat investor swasta untuk menanamkan modalnya.

Menurut Ray (2013), kondisi jalan di Provinsi Lampung telah mengalami penurunan kualitas yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya dana pemeliharaan dan kurang efektifnya pelaksanaan program perawatan infrastruktur meskipun alokasi anggaran telah tersedia. Akibatnya, kegiatan pemeliharaan menjadi tidak efisien, kualitas jalan cepat menurun, dan beban biaya tinggi justru harus ditanggung oleh masyarakat sebagai pengguna jalan. Fenomena ini menjadi tantangan besar dalam upaya pemerintah mendorong pembangunan yang lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan, terutama di wilayah pedesaan yang sangat bergantung pada konektivitas infrastruktur.

Dengan demikian, peningkatan infrastruktur jalan di Provinsi Lampung menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera direspons melalui kebijakan yang tepat, perencanaan anggaran yang efisien, serta pengawasan pelaksanaan yang ketat agar hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

	Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km)		
Kondisi Jalan	2021	2022	2023
Baik	1189.324	1162657	1003.638
Sedang	283.298	237159	360.352
Rusak	80.986	126755	186.45
Rusak Berat	2.607	29645	85.72

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2024

Tabel data yang tersedia menunjukkan bahwa terdapat tren penurunan kualitas infrastruktur jalan di Provinsi Lampung dalam periode 2021 hingga 2023. Pada tahun 2021, panjang jalan dengan kondisi baik tercatat mencapai 1.189,324 km. Namun, pada

tahun 2022 menurun menjadi 1.162,657 km, dan terus menurun signifikan hingga 1.003,638 km pada tahun 2023. Sementara itu, jalan dengan kondisi sedang mengalami fluktuasi, dari 283,298 km di tahun 2021, menurun menjadi 237,159 km di tahun 2022, lalu meningkat menjadi 360,352 km pada tahun 2023.

Sebaliknya, kondisi jalan yang rusak dan rusak berat menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Jalan rusak meningkat dari 80,986 km pada tahun 2021 menjadi 126,795 km di tahun 2022, dan naik lagi menjadi 186,450 km pada tahun 2023. Demikian pula, panjang jalan rusak berat mengalami lonjakan dari 2,607 km di tahun 2021 menjadi 29,645 km pada tahun 2022, dan mencapai 85,720 km di tahun 2023. Data ini secara keseluruhan mengindikasikan bahwa kualitas jalan di Provinsi Lampung mengalami penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun, yang berpotensi menghambat mobilitas, distribusi barang dan jasa, serta mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat.

Infrastruktur jalan merupakan salah satu komponen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Keberadaannya memungkinkan mobilitas orang dan barang antarwilayah secara efisien, yang pada gilirannya dapat mendorong peningkatan produktivitas rumah tangga maupun sektor industri. Selain itu, ketersediaan infrastruktur dasar lainnya seperti air bersih dan listrik juga menjadi faktor pendukung dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan akses yang merata terhadap infrastruktur-infrastruktur tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran serta masyarakat juga sangat diperlukan dalam proses pembangunan infrastruktur. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang turut bertanggung jawab dan berkontribusi dalam menjaga serta memelihara hasil pembangunan tersebut. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan infrastruktur dapat meningkatkan transparansi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.

Selain jalan, infrastruktur penting lainnya yang turut menentukan arah pembangunan ekonomi daerah adalah ketenagalistrikan. Energi listrik merupakan kebutuhan utama dalam menunjang aktivitas produksi, baik di sektor rumah tangga maupun industri. Semakin berkembang suatu wilayah, semakin tinggi pula permintaan akan energi listrik, yang bukan hanya untuk konsumsi rumah tangga, tetapi juga untuk

mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial seperti pendidikan, layanan kesehatan, hingga industri manufaktur.

Infrastruktur ketenagalistrikan mencakup aspek pembangkitan, transmisi, distribusi, gardu induk, serta infrastruktur pendukung lainnya. Keberadaan infrastruktur ini memungkinkan pasokan listrik tersedia secara merata dan terjangkau, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Peningkatan konsumsi listrik secara langsung dapat berkontribusi terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), karena listrik merupakan salah satu faktor produksi utama dalam berbagai aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur baik jalan maupun listrik merupakan hal yang krusial dan harus menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala terhadap kondisi infrastruktur yang ada, meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran, serta melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat, untuk mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.

Data Jumlah Pelanggan Listrik Provinsi Lampung

	Jumlah Pelanggan Listrik	
Wilayah	2014	2015
Lampung Barat	652.17	681.88
Tanggamus	986.69	104.554
Lampung selatan	209.617	220.827
Lampung Timur	199.462	209.481
Lampung Tengah	238.511	252.34
Lampung Utara	132.091	136.77
Way kanan	880.43	944.88
Tulang Bawang	901.73	943.12
Pesawaran	754.51	806.44
Pringsewu	790.77	838.31
Mesuji	490.87	492.45
Tulang Bawang Barat	479.61	485.01
Pesisir Barat	_	_
Bandar lampung	226.849	243.535
Metro	147.88	458.13
Provinsi lampung	161.499.6	173.252.9

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Data yang tersedia menunjukkan pertumbuhan signifikan jumlah pelanggan listrik di berbagai wilayah Provinsi Lampung antara tahun 2014 dan 2015. Lampung Barat mengalami peningkatan jumlah pelanggan dari 652,17 menjadi 681,88, sementara Tanggamus bertambah dari 986,69 menjadi 1.045,54. Wilayah-wilayah lain seperti Lampung Selatan dan Lampung Timur masing-masing mencatatkan kenaikan dari 209.617 menjadi 220.827, dan dari 199.462 menjadi 209.481 pelanggan.

Lampung Tengah menunjukkan pertumbuhan dari 238.511 menjadi 252.340, sedangkan Lampung Utara meningkat dari 132.091 menjadi 136.770. Way Kanan juga mengalami kenaikan dari 880,43 menjadi 944,88, serta Tulang Bawang dari 901,73 menjadi 943,12. Di wilayah Pesawaran, pelanggan listrik meningkat dari 754,51 menjadi 806,44, dan di Pringsewu dari 790,77 menjadi 838,31. Mesuji mengalami sedikit kenaikan dari 490,87 menjadi 492,45, sedangkan Tulang Bawang Barat meningkat dari 479,61 menjadi 485,01. Untuk wilayah Pesisir Barat, data tidak tersedia pada kedua tahun tersebut.

Di wilayah perkotaan, Bandar Lampung mencatatkan peningkatan dari 226.849 menjadi 243.535 pelanggan, sementara Kota Metro mengalami lonjakan signifikan dari 147,88 menjadi 458,13 pelanggan. Secara total di tingkat provinsi, jumlah pelanggan listrik meningkat dari 161.499,6 pada tahun 2014 menjadi 173.252,9 pada tahun 2015.

Peningkatan jumlah pelanggan ini mencerminkan bahwa Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah berhasil memperluas jangkauan distribusi listrik dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur ketenagalistrikan di Provinsi Lampung semakin berkembang, yang berperan penting dalam mendorong berbagai aktivitas ekonomi. Listrik sebagai salah satu bentuk energi final memiliki peranan vital dalam mendukung produktivitas sektor rumah tangga, industri, perdagangan, serta pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, keberadaan dan perluasan infrastruktur ketenagalistrikan secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.

Faktor-faktor Penghambat Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Lampung

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan yang masih mengalami keterbatasan sarana dan

prasarana. Di Provinsi Lampung, banyak desa yang belum memiliki infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, jaringan listrik, dan fasilitas publik lainnya. Namun demikian, proses pembangunan yang ada sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat efektivitas pelaksanaannya.

Salah satu permasalahan utama adalah minimnya keterlibatan masyarakat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi dan proses perencanaan menyebabkan pembangunan sering kali tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Pemerintah cenderung memperlakukan desa hanya sebagai objek pembangunan, bukan sebagai subjek yang aktif dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan. Akibatnya, pembangunan yang dilaksanakan terkesan sebagai "hadiah" dari pemerintah, dan bukan sebagai solusi dari permasalahan yang dirasakan masyarakat. Dampak dari pendekatan ini adalah rendahnya efektivitas pembangunan infrastruktur, yang tidak tepat sasaran, tidak selesai tepat waktu, serta kurang memberikan dampak signifikan terhadap penyelesaian persoalan lokal.

Menurut Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, beberapa kendala utama yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur antara lain keterbatasan anggaran serta aktivitas kendaraan over dimension over load (ODOL) yang mempercepat kerusakan jalan. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga terhambat oleh proses pembebasan lahan yang kompleks dan koordinasi lintas instansi yang kurang optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang bersifat menyeluruh seperti peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, strategi pembebasan lahan yang adil dan efektif, serta penguatan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

Secara umum, tantangan pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek berikut:

1. **Aksesibilitas dan Transportasi yang Terbatas**
   Infrastruktur transportasi, terutama di wilayah pedesaan dan pesisir seperti Kabupaten Tanggamus dan Pesisir Barat, masih sangat terbatas. Jalan-jalan yang rusak, berlubang, dan kurang perawatan menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi barang dari dan ke wilayah tersebut. Meskipun Lampung memiliki pelabuhan besar seperti Pelabuhan Panjang, keterbatasan infrastruktur jalan membuat distribusi logistik ke daerah terpencil tidak optimal.

2. **Keterbatasan Pembiayaan atau Anggaran**
   Salah satu kendala utama adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek besar seperti Jalan Tol Trans Sumatera, khususnya ruas Bakauheni-Terbanggi Besar, mengalami hambatan akibat keterbatasan dana serta biaya tinggi dalam proses pembangunan dan pemeliharaan.
3. **Masalah Pembebasan Lahan**
   Proses pembebasan lahan sering menjadi permasalahan krusial dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Beberapa kasus, seperti pengadaan lahan untuk Jalan Tol Trans Sumatera di Kabupaten Lampung Selatan dan Lampung Tengah, menunjukkan adanya perselisihan antara masyarakat dan pemerintah, khususnya terkait "tanah sisa" yang belum diberikan ganti rugi secara adil. Hal ini menimbulkan ketidakpuasan dan memperlambat proses pembangunan.
4. **Kerusakan Infrastruktur Akibat Bencana Alam**
   Lampung merupakan wilayah yang rawan terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan erupsi gunung. Kerusakan infrastruktur akibat bencana, seperti jembatan dan jalan yang rusak di Lampung Timur dan Lampung Tengah akibat banjir, menjadi tantangan besar yang menghambat kelancaran aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan infrastruktur yang tangguh terhadap bencana (disaster-resilient infrastructure).

Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi lampung

Secara umum, pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur melalui PDRB, yaitu total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit produksi dalam suatu wilayah. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak hanya bergantung pada angka PDRB semata, melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor fundamental yang mendasari dinamika perekonomian.

Dua faktor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah **kapital (modal)** dan **tenaga kerja**. Kapital mencakup investasi dari sektor publik maupun swasta. Investasi swasta dapat berupa pembangunan fasilitas produksi seperti pabrik, pembelian mesin, dan infrastruktur penunjang lainnya. Sementara itu, investasi publik diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sistem

telekomunikasi, serta jaringan listrik yang tergolong sebagai *public capital*. Kehadiran infrastruktur ini memberikan dampak positif dalam mempercepat aktivitas ekonomi serta meningkatkan konektivitas antar wilayah.

Konsep **capital deepening**, yaitu peningkatan modal yang tersedia per tenaga kerja, memungkinkan tenaga kerja untuk bekerja secara lebih produktif dengan memanfaatkan teknologi dan fasilitas yang ada. Semakin tinggi akses tenaga kerja terhadap kapital, maka semakin besar pula potensi peningkatan produktivitas dan output ekonomi yang dihasilkan.

Selain itu, **human capital** atau kualitas sumber daya manusia juga berperan krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Human capital berkaitan erat dengan tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang secara langsung berpengaruh terhadap kemampuan kerja, inovasi, dan produktivitas tenaga kerja. Pengeluaran di bidang pendidikan dan kesehatan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung ke depan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan faktor kapital, kualitas tenaga kerja, serta efektivitas pengelolaan infrastruktur. Dukungan kebijakan yang pro-investasi dan berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia menjadi krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010(Miliar Rupiah)		
Kabupen/ Kota	2022	2023	2024
Lampung Barat	5.256,95	5.502,92	5.742,84
Tanggamus	11.384,34	11.919,46	12.397,91
lampung Selatan	31.986,26	33.528,67	35.077,05
Lampung timur	29.587,41	30.625,30	32.039,52
Lampung Tengah	50.973,45	53.366,74	55.829,71
Lampung Utara	17.257,06	17.985,80	18.722,40
Way Kanan	10.165,60	10.635,97	11.130,37
Tulang Bawang	16.685,48	17.399,75	18.225,72
Pesawaran	12.016,35	12.555,57	13.044,68
Pringsewu	8.214,07	8.606,96	9.001,15

Mesuji	7.355,55	7.653,92	8.004,38
Tulang Bawang barat	8.328,39	8.705,98	9.101,70
Pesisir Barat	3.221,12	3.331,35	3.418,39
Bandar Lampung	41.798,71	43.870,15	46.051,58
Metro	4.554,76	4.775,93	5.009,08
Provinsi Lampung	257.534,19	269.240,54	281.557,20

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi lampung, 2024

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2022 hingga 2024 menunjukkan tren yang positif, sebagaimana tercermin dalam peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari **Rp257.534,19 miliar** pada tahun 2022 menjadi **Rp281.557,20 miliar** pada tahun 2024. Kenaikan ini tidak dapat dilepaskan dari peran penting infrastruktur sebagai fondasi utama yang menopang aktivitas ekonomi regional.

Infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, jembatan, pelabuhan, bandara, jaringan energi, dan telekomunikasi, telah memberikan kontribusi signifikan terhadap kelancaran distribusi barang dan jasa, peningkatan investasi, dan efisiensi logistik. Kota **Bandar Lampung**, sebagai pusat ekonomi utama provinsi, mencatatkan PDRB tertinggi, yaitu meningkat dari **Rp41.798,71 miliar** pada 2022 menjadi **Rp46.051,58 miliar** pada 2024. Keunggulan ini ditunjang oleh infrastruktur kota yang relatif lengkap, termasuk jalan penghubung antar pusat bisnis, kawasan industri, serta konektivitas langsung ke **Pelabuhan Panjang** sebagai gerbang ekspor-impor utama provinsi.

Hal serupa terjadi di **Lampung Tengah**, yang mencatat pertumbuhan signifikan dengan PDRB naik dari **Rp50.973,45 miliar** menjadi **Rp55.829,71 miliar** dalam periode yang sama. Ketersediaan jalur transportasi nasional yang baik telah mempermudah distribusi komoditas unggulan daerah ini, seperti singkong, padi, dan kelapa sawit. Demikian pula **Lampung Timur**, yang menunjukkan peningkatan PDRB dari **Rp29.587,41 miliar** menjadi **Rp32.039,52 miliar**, juga mendapatkan manfaat dari pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi yang berdampak langsung pada produktivitas sektor pertanian dan perdagangan lokal.

Pembangunan **Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS)** menjadi infrastruktur strategis yang memberikan pengaruh besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi

regional. Tol ini mempercepat arus logistik, menurunkan biaya transportasi, dan memperluas pasar bagi produk lokal, sehingga meningkatkan daya saing Lampung dalam konteks nasional. Di sisi lain, **Bandara Radin Inten II** yang telah ditingkatkan menjadi bandara internasional turut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, perdagangan, serta mempercepat mobilitas manusia dan barang lintas daerah maupun negara.

Namun demikian, daerah-daerah dengan infrastruktur yang masih terbatas menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. **Kabupaten Pesisir Barat**, misalnya, hanya mengalami peningkatan PDRB dari **Rp3.221,12 miliar** pada 2022 menjadi **Rp3.418,39 miliar** pada 2024. Tantangan geografis dan aksesibilitas menjadi faktor penghambat utama. Begitu pula **Kabupaten Mesuji**, yang masih menghadapi kendala dalam pengembangan kawasan industri dan konektivitas transportasi, menyebabkan pertumbuhannya lebih lambat dibanding daerah lain.

Infrastruktur sebagai Pengungkit Pemerataan Ekonomi

Menurut *World Development Report* (World Bank, 1994), infrastruktur memiliki peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Daerah dengan ketersediaan infrastruktur yang baik cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia, termasuk Lampung, infrastruktur telah menjadi prioritas utama sebagai alat untuk mempercepat integrasi wilayah dan memperkecil ketimpangan antar daerah.

Infrastruktur ekonomi mencakup aset-aset fisik yang menyediakan layanan publik dan digunakan dalam proses produksi dan konsumsi. Ini mencakup sektor utilitas (air minum, sanitasi, listrik, telekomunikasi), pekerjaan umum (bendungan, irigasi, drainase), serta transportasi (jalan, rel kereta api, pelabuhan, dan bandara). Di Provinsi Lampung, ketersediaan **1.159,57 km jalan negara** dan **1.702,81 km jalan provinsi**, dengan peringkat ke-10 dalam hal kerapatan jalan secara nasional, menunjukkan bahwa konektivitas wilayah sudah berada dalam tahap yang cukup baik, meskipun pemerataan infrastruktur antardaerah masih menjadi tantangan.

Sumber Daya Manusia dan Teknologi sebagai Penunjang

Pembangunan infrastruktur yang efektif perlu didukung oleh peningkatan **kualitas sumber daya manusia (SDM)**. Pekerja dengan pendidikan dan keterampilan yang baik cenderung lebih produktif dan mampu memanfaatkan infrastruktur serta

teknologi yang tersedia secara optimal. **Transfer pengetahuan**, pengalaman, dan keahlian juga lebih memungkinkan jika pekerja memiliki kapasitas intelektual yang cukup.

Selain itu, **kemajuan teknologi** menjadi elemen penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi. Teknologi memungkinkan proses produksi menjadi lebih efisien, bahkan tanpa peningkatan signifikan dalam jumlah tenaga kerja. Oleh karena itu, selain memperluas pembangunan infrastruktur fisik, penting pula untuk mengembangkan infrastruktur lunak seperti pendidikan, pelatihan vokasi, dan literasi digital bagi masyarakat.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur di Provinsi Lampung memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Infrastruktur yang memadai tidak hanya memperkuat konektivitas antardaerah, tetapi juga membuka peluang investasi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi kebijakan infrastruktur agar pembangunan berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat perkembangan signifikan dalam sektor transportasi dan fasilitas publik di beberapa wilayah utama Lampung, khususnya di Bandar Lampung, Lampung Tengah, dan Lampung Timur. Namun, tantangan yang dihadapi tidak sedikit. Keterbatasan anggaran, birokrasi yang masih kompleks, serta lemahnya koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi penghambat utama dalam realisasi proyek-proyek infrastruktur.

Tanpa upaya strategis untuk mengatasi hambatan tersebut, pembangunan infrastruktur dikhawatirkan tidak akan memberikan manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih adaptif dan terintegrasi, disertai komitmen tinggi dari semua pemangku kepentingan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, penulis memberikan beberapa rekomendasi strategis sebagai berikut:

1. Efisiensi Anggaran dan Kemitraan Strategis

Pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran secara lebih efisien dengan memprioritaskan proyek infrastruktur yang berdampak besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, perlu ditingkatkan kerja sama dengan sektor swasta melalui skema investasi seperti Public-Private Partnership (PPP) guna mempercepat realisasi proyek tanpa membebani keuangan negara secara berlebihan.

2. Reformasi Regulasi dan Penguatan Kapasitas Aparatur

Simplifikasi regulasi serta peningkatan koordinasi antar instansi menjadi langkah penting untuk mempercepat pelaksanaan proyek infrastruktur. Selain itu, perlu dilakukan pengembangan kapasitas aparatur pemerintah dalam hal manajemen proyek, perencanaan teknis, dan pengawasan, disertai dengan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang kuat.

3. Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Digital

Pemerintah daerah disarankan untuk mengadopsi sistem digital dalam proses perencanaan, pemantauan, dan evaluasi proyek infrastruktur. Penggunaan teknologi modern seperti Geographic Information System (GIS), dashboard monitoring, dan platform transparansi anggaran dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan serta memperkuat pengawasan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Afriansyah, M. R. (2023). Pengaruh Belanja Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. *Skripsi Universitas Sriwijaya*.

Astuti, D. (2017). Tingkat dukungan pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur jalan (desa tanjung harapan kecamatan seputih banyak kabupaten lampung tengah. *Thesis UIN Raden Intan Lampung: Repository Raden Intan* .

Damanik, D. d. (2024). Analisis pengaruh infrastruktur jalan dan infrastruktur listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Pematang Siantar. *Jurnal Kajian Fenomena Ekonomi dan Bisnis: KAFEBIS, Vol, 02, No,01*.

Disasmita, R. (2013). *Teori-Teori Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Wilayah.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Fadhil, M. (2022). Kajian Dampak Pembangunan Infrastruktur Transportasi Terhadap Pertumbuhan Inklusif Ekonomi Regional. *Jurnal Magister Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 2*, 87-96.

Fauzi, A. (2019). Pengaruh Kompetensi terhadap Kinerja Pegawai pada Biro Pemerintahan dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat. *Politicon : Jurnal Ilmu Politik, Vol. 7, No. 1*, 88-103.

Hapsari, S. T. (2011). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Petumbuhan Ekonomi Indonesia. *Skripsi: FEB Uin Syarif Hidayatullah. Jakarta*.

Lampung, B. P. (2020). Kajian Pengembangan Infrastruktur Jalan. *Bapedda Provinsi Lampung.*

Lampung, B. P. (2023). Data Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung. BPS Provinsi Lampung.

Marsono. (2005). *Sejarah Pemerintahan Dalam Negeri.* Jakarta: CV. Eka Jaya, cetakan VII, Pustaka .

Maryaningsih, N. (2014). Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Buletin Jurnal Ekonomi Moneter dan Perbankan, vol. 17, no.1*.

Oktaviani, V. (2024). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. *Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, Vol. , No.6*.

Ray, D. (2015). Jaringan Jalan Daerah yang Rusak di Indonesia . *Jurnal Prakarsa Infrastruktur Indonesia Edisi 14, vol. 4, No. 9*.

Sadikin, S. H. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat di kecamatan ulumanda. *jurnal peqguruang ol. 3, no. 2*, 834.

Sondang P, S. (2005). *Administrasi pembangunan : konsep, dimensi dan strateginya.* Jakarta: PT Bumi Aksara.

Sriwati, E. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur. *jurnal kajian ilmiah mahasiswa administrasi publik:KIMAP, Vol. 5, No. 1*, 105-105.

Sriwati, E. (n.d.). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Infrastruktur.

Tarigan, R. (2024). *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Tsaurah, Z. (2018). Penyelesain Atas tanah Sisa Pada Pengadaan Tanah Di Provinsi Lampung. *Yogyakarta: Jurnal Tunas Agraria Vol. 1 No. 1*.

Wahyuni, T. (2009). Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Terhadap Produktivitas Ekonomi di Indonesia. *Skripsi Institute Pertanian Bogor Repository*.